

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena UMKM sebagai sektor swasta yang menjadi sarana menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian serta meminimalkan angka kemiskinan. Namun demikian, menurut Kepala Bidang (Kabid) UKM Sultoni Nurifai bahwa potensi UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi UMKM disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja yaitu mengenai permodalan.¹ Sehingga perkembangan UMKM tidak semata-mata berjalan lancar tanpa sokongan modal usaha.

Permasalahan yang menyangkut tentang permodalan yaitu dikarenakan perbedaan perspektif antara UMKM dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Lembaga keuangan berhati-hati memberikan pinjaman kepada UMKM karena resiko usaha dan sejarah yang dimiliki UMKM. Sehingga pelaku UMKM harus mampu meyakinkan kepada lembaga keuangan bahwa usaha yang mereka jalankan lancar dan mampu mengembalikan pinjaman.

¹ <http://m.harianjogja.com/baca/2016/01/19/usaha-kecil-menengah-umkm-diy-tumbuh-hingga-10-per-tahun-682072> diakses pada 28 April 2017 pukul 09.22

Menurut Tri Saktiyana selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY menyatakan bahwa kondisi UMKM harus sehat dalam arti memiliki manajemen keuangan yang baik dan prospek usaha yang baik pula. Untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan, UMKM harus mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan.² Namun bagi pelaku usaha mikro sampai menengah masih kesulitan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan seperti jaminan dan tingkat bunga dari lembaga keuangan yang tinggi.

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan potensi usaha mikro dan kecil yang besar karena Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota yang mempunyai aset pariwisata budaya sehingga mendorong para pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan survey kementerian koperasi dan UKM tahun 2016, pelaku UMKM semakin meningkat. Berikut adalah hasil survey jumlah UMKM DIY pada tahun 2014-2015

Tabel 1.1 Jumlah UMKM DIY Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah dalam angka (unit)
-------	---------------------------

² <http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/31/umkm-diy-bukan-hanya-modal-ini-kendala-yang-dihadapi-umkm-749179> diakses pada 10 Maret 2017 pukul 13.27

2014	220.703
2015	230.047

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan kemajuan jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar 4,23% atau 9.344 unit.³ Dampak kemajuan jumlah unit UMKM memberikan dampak positif bagi pembangunan perekonomian daerah.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM DIY Berdasar Kategori Tahun 2016

Kategori	Jumlah (%)
Mikro	55
Kecil	25
Menengah	15
Besar	5

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2016

Berdasar data tabel diatas, UMKM memberikan kontribusi sebanyak 95% dari seluruh total perekonomian di Yogyakarta. Dimana pelaku usaha mikro sangat dominan pada presentase 55%.⁴ Namun banyaknya UMKM menimbulkan dampak negative bagi pelaku usaha karena daya saing yang sangat ketat. Di Yogyakarta

³ <http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/download/326.pdf> diakses pada 28 April 2017 di akses pada 11.06

⁴ <http://umkm.jogjakota.go.id/direktori2group.php?mod=ci> diakses pada 28 April 2017 di akses pukul 14.40

jumlah UMKM terbesar meliputi perdagangan pangan sebesar 30% dari total jumlah UMKM yang ada.⁵ Kasus ini memberikan daya saing antara pelaku usaha sehingga pelaku usaha mikro dan kecil sangat susah untuk berkembang karena pemasaran yang terbatas sehingga pendapatan usaha minim atau sedikit.

Faktor yang membuat susah berkembangnya UMKM karena kendala modal. Namun demikian, untuk mendapat pinjaman modal dari instansi keuangan sangat susah karena faktor kehati-hatian untuk memberikan pinjaman kepada pelaku bisnis karena kembali lagi kepada perkembangan usaha UMKM tersebut. Sehingga koperasi menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM yang terkendala karena faktor modal usaha.

Menurut undang-undang No 25 tahun 1992, koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan koperasi tersebut mempunyai fungsi membangun, mengembangkan, mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat.⁶ Namun demikian, koperasi dirasa masih terlalu tinggi dalam pengambilan keuntungan pinjaman yang membuat kesan bahwa koperasi sama halnya dengan rentenir. Sehingga muncul koperasi dengan prinsip syariah dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

⁵ <http://m.harianjogja.com/baca/2016/01/19/usaha-kecil-menengah-umkm-diy-tumbuh-hingga-10-per-tahun-682072> diakses pada 28 April 2017 pukul 10.30

⁶ Manulang, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Indeks, 2013, hal. 79

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang berinteraksi dengan usaha-usaha kecil. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik.

KSPPS mempunyai produk pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* yang merupakan solusi baru bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terlilit oleh permodalan usaha. Dimana *musyarakah* atau *syirkah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau kesepakatan bersama.⁷ Sedangkan bagihasil bisa berbentuk modal dan tenaga yang terdiri dari dua atau lebih orang untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan memenuhi kewajiban yang sama.⁸

Tabel 1.3 Jumlah UKM Berdasarkan Gender di Provinsi Yogyakarta Tahun
2014

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 176

⁸ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hal. 30

No	Kabupaten	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	10.053	8.175	18.228
2	Sleman	12.864	13.753	26.617
3	Bantul	10.534	8.383	18.917
4	Kulon Progo	12.005	13.507	25.512
5	Gunung Kidul	15.200	22.625	37.825

Sumber: Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Perindagkop DIY

Dari data tersebut, Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan UKM terbanyak setelah Kabupaten Gunung Kidul.⁹ Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan. Namun demikian, potensi untuk lebih dikembangkan pada Kecamatan Kalasan karena mempunyai aset yang mendukung pertumbuhan perekonomian usaha mikro seperti pasar tradisional, kerajinan tangan, swalayan, tempat pariwisata, pendidikan, pertanian, perikanan dan perternakan.¹⁰ Sehingga peran KSPPS sangat dibutuhkan untuk membantu permodalan agar usaha mikro di daerah Kalasan bisa berkembang.

KSPPS Bina Warga Sejahtera merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di daerah Sambiroto Padukuhan Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. KSPPS Bina Warga Sejahtera banyak

⁹ <http://disperindag.jogjaprovo.go.id/mobile/berita-559-profil-ukm-diy-tahun-2014.html> diakses pada 20 April 2017 pukul 14.50

¹⁰ <https://slemankab.bps.go.id/Kecamatan-Kalasan-Dalam-Angka-2014.pdf> diakses pada 13 Mei 2017 pukul 21.22

bergerak disektor produktif sebesar 69,95% dari total pembiayaan. Lokasi KSPPS Bina Warga Sejahtera yang berada disekitar Pasar Stan dan Pasar Purwomartani memungkinkan untuk berperan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil yang ada. Bantuan Modal dari KSPPS Bina Warga Sejahtera melalui pembiayaan musyarakah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perkembangan usaha mikro disekitarnya terutama pada nasabah anggota pembiayaan musyarakah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Perkembangan Usaha Mikro Di Kalasan (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Musyarakah KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perkembangan usaha (dilihat dari modal, omset dan keuntungan usaha) nasabah pembiayaan musyarakah di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta?
2. Bagaimana perbedaan perkembangan usaha (dilihat dari modal, omset dan keuntungan usaha) nasabah antara sesudah dan sebelum menerima pembiayaan musyarakah di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis kondisi perkembangan usaha (dilihat dari modal, omset dan keuntungan usaha) nasabah pembiayaan musyarakah di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis perbedaan perkembangan usaha (dilihat dari modal, omset dan keuntungan usaha) nasabah antara sesudah dan sebelum menerima pembiayaan musyarakah di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan usaha UMKM setelah menerima pembiayaan musyarakah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan gambaran informasi bagi lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait dalam lembaga keuangan syariah untuk lebih memaksimalkan pembiayaan terutama pada pembiayaan musyarakah agar lebih produktif.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan agar lebih memahami bagaimana pengaruh perkembangan usaha UMKM setelah menerima pembiayaan musyarakah.

c. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya tentang pengaruh perkembangan usaha UMKM setelah menerima pembiayaan musyarakah.